

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Engson Qinaris Jaladri

enyokinaris5@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to test empirically the influence of human resources quality, internal control system, facilities and infrastructures, and organization commitment to the effectiveness of the implementation of accrual based government accounting standard. This research is used qualitative approach. The sample collection method has been done purposive sampling. The data is primary data which has been obtained by issuing questionnaires. The data analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions. The result of this research shows that human resources do not have any influence to effectiveness of the implementation of accrual based government accounting standard. Meanwhile, internal control system, facilities and infrastructures, and organization commitment has positive influence to the effectiveness of the implementation of accrual based government accounting standard.

Keywords: *Accrual based government accounting standard, human resources quality, internal control system, facilities and infrastructures, organization commitment.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, ketersediaan sarana dan prasarana, dan komitmen organisasi terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan sistem pengendalian internal, ketersediaan sarana dan prasarana serta komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, kualitas sumber daya, sistem pengendalian internal, sarana dan prasarana, komitmen organisasi.

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *Good Governance*. Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan peraturan yang menuntut pemerintah pusat juga pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah selesai disusun Komite Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan tersebut mensyaratkan penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah secara

beratahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun akhir 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah sudah harus menerapkan SAP berbasis akrual. Teknik akuntansi berbasis akrual dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu keefektifan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sangat diperlukan pemerintah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik sehingga menghasilkan laporan keuangan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Melihat hal tersebut, pemerintah daerah wajib memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang keuangan daerah dan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Ardiansyah (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah SKPD maka semakin siap pula sumber daya manusia tersebut untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Maka dari itu harus dipastikan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Meskipun pemerintahan memiliki seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan yang memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh Widyaningrum dan Rahamawati (2010) bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah dinyatakan dengan ketepatanwaktu dan keterandalan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sangat diperlukan karena dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam menunjang keefektifan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Febiani (2014) berpendapat bahwa sarana dan prasarana adalah semua yang dapat menunjang atau mendukung segala kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung ketepatanwaktu dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana serta potensi pemanfaatannya secara luas juga dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual juga diperlukan komitmen pemerintah daerah agar peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan berjalan dengan efektif. Putra dan Ariyanto (2015) menyatakan secara empiris bahwa komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual karena semakin tinggi komitmen organisasi dalam penerapan peraturan pemerintahan, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dengan pemerintah daerah yang memiliki komitmen organisasi tinggi, maka pemerintah akan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat laporan keuangan pemerintah lebih transparan dan memiliki akuntabilitas.

Dari beberapa penelitian mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, ketersediaan sarana dan prasarana dan komitmen organisasi terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Objek yang digunakan adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan karena efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan barometer dalam meningkatkan pengelolaan laporan keuangan pemerintah agar lebih akuntabel dan transparan.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Teori Kebijakan Publik

Nugroho (2003: 77) mengatakan terdapat banyak jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya yang diletakkan dalam konteks kebijakan publik, yaitu jenis pelayanan yang berbentuk *distributive, redistributif, dan regulatif*. Kebijakan diartikan dengan pernyataan-pernyataan umum yang memberikan bimbingan dalam menentukan keputusan yang fungsinya adalah menandai lingkungan sekitar yang dibuat, sehingga memberikan jaminan bahan keputusan-keputusan tersebut akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pernyataan tersebut menjelaskan, bahwa kebijakan publik adalah sikap pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka menanggapi permasalahan yang timbul pada masyarakat. Sehubungan dengan itu, Dunn (2003) menyatakan bahwa proses kebijakan sendiri memiliki empat tahapan, yaitu penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi atau legitimasi kebijakan, dan penilaian atau evaluasi kebijakan.

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Daft (2003), implementasi merupakan langkah awal dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administrasi dan persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih ke dalam tindakan. Kebijakan atau peraturan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individu maupun kelompok atau intitusi.

Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Dalam berbagai sistem politik kebijakan publik diimplementasikan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Supaya kebijakan dapat diimplementasikan terdapat tiga kegiatan untuk mengoperasikan program bagi implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip - prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Menurut Afifah (2009), Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu pengakuan, pengukuran, pengungkapan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ataupun daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, yaitu yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah adalah mengurus dan mengatur laporan keuangan daerah dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum mengandung arti bahwa suatu laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Faktor-Faktor Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua

Menurut pendapat Mahmudi (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Rahmansah (2012) menyatatakan bahwa faktor yang diduga sangat mempengaruhi keefektivan dari penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua dibedakan atas faktor yang bisa dikendalikan oleh pemerintah dan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah. Faktor yang bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah komitmen organisasi, sumber daya manusia dan perangkat pendukung. Sedangkan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang terjadi begitu cepat. Menurut Febiani (2014) dalam mencapai efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua perlu dipahami beberapa dasar pemikiran penting yaitu sumber daya manusia yang berkompeten, komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana dalam membantu penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan misi dan misi serta tujuan dari organisasi. Arfianti (2011) menyatakan sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Persaingan dalam sumber daya manusia sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas. Kualitas sumber daya manusia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Semakin banyak pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, maka semakin kuat daya saingnya. Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas suatu program atau kegiatan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Menurut Arens *et al* (2008) sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dari operasional.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan menacapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan efektif dan dapat juga mendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Komitmen Organisasi

Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi lebih tepat. Kejelasan sasaran anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah akan berdampak pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Penerapan SAP berbasis Akrual

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah karena sumber daya manusia selalu terkait, mulai dari penetapan standar akuntansi hingga penerapan standar akuntansi tersebut. Salah satu manfaat utama pengguna kompetensi dalam organisasi adalah menggerakkan sumber daya manusia kearah target yang ingin dicapai organisasi (Sulani, 2009). Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah SKPD maka semakin siap pula sumber daya manusia tersebut untuk dapat menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (Ardiansyah, 2012). Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penerapan SAP berbasis Akrual

Sistem pengendalian internal merupakan alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah dalam penerapan peraturan (Priyama et al, 2014). Berdasarkan uraian diatas maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan:

H₂: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penerapan SAP berbasis Akrual

Sarana dan prasarana adalah semua yang dapat menunjang atau mendukung segala kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tersedianya sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan efektif dan dapat juga mendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan (Febiani, 2014). Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan SAP berbasis Akrual

Komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual karena semakin tinggi komitmen organisasi dalam penerapan peraturan pemerintahan, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dengan pemerintah daerah yang memiliki komitmen organisasi tinggi, maka pemerintah akan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat laporan keuangan pemerintah lebih transparan dan memiliki akuntabilitas (Putra dan Ariyanto, 2015). Berdasarkan uraian diatas maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan:

H₄: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini akan membahas apakah sumber daya manusia yang berkualitas, sistem pengendalian internal, ketersediaan sarana dan prasarana serta komitmen organisasi sebagai variabel independen mempengaruhi efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai variabel dependen. Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan melakukan analisis data berdasarkan prosedur statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dengan kriteria, yaitu responden pernah berpartisipasi dalam pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sampel penelitian terdiri dari kepala dinas, sekretaris, kepala bagian dan kepala sub bagian dari setiap SKPD, dan sub unit kerja di lingkungan SKPD yang memiliki tugas pokok terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer Data primer pada penelitian ini berupa data yang belum diolah yang diperoleh dari hasil kuisisioner yang telah diisi oleh PPK SKPD yang terlibat dalam proses pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah dan informasi dari instansi berupa sejarah atau struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pengisian kuisisioner dilakukan secara langsung oleh responden dengan memberi tanda pada jawaban yang telah disediakan. Jenis kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup dan terstruktur, yang berarti jawaban pada setiap pertanyaan yang disediakan untuk responden tidak memberikan kesempatan untuk jawaban lain selain pada jawaban yang disediakan

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua. Kefektifan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua adalah kemampuan atau kinerja dari masing-masing SKPD dalam melaksanakan peraturan tersebut. Hal ini dimulai dari proses penyusunan jenis dan komponen laporan keuangan pemerintah daerah sampai penyajian laporan keuangan tahunan.

Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang diduga secara bebas berpengaruh terhadap variable dependen. Terdapat empat variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu (a) Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, (b) Sistem pengendalian internal adalah komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah perancangan yang memadai, penggunaan dokumen-dokumen, catatan-catatan bernomor, pemisahan tugas, otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, pemeriksaan independent atas kinerja, dan penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat, (c) Ketersediaan sarana dan prasarana adalah adanya suatu alat untuk menunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan menacapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, (d) Komitmen organisasi berkaitan dengan kemauan yang kuat dalam diri individu untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Ketika komitmen organisasi tinggi maka rasa memiliki terhadap organisasi itu tinggi sehingga kontribusi untuk mampu mencapai keselarasan tujuan antara tujuan masing-masing individu dan tujuan organisasi akan terwujud.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang mengemukakan tentang data diri responden, yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuisisioner. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan, selanjutnya dihitung

persentasenya. Prosedur statistika deskriptif dalam program SPSS menghitung nilai dari rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

Uji Kualitas Data

Dalam menentukan kualitas data yang diperoleh dari jawaban para responden digunakan uji validitas dan uji reliabilita. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi $< 0,05$, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total, begitu juga sebaliknya. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Model regresi yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi-asumsi yang disebut asumsi klasik. Adapun asumsi-asumsi yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: (a) Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan *histogram*, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Kedua, dengan *normal probability plot*, yaitu distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal, (b) Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinieritas dapat dilihat pada tolerance value atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas. Apabila ternyata terdapat multikolinieritas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan (Ghozali, 2009), (c) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas begitu juga sebaliknya.

Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Bentuk persamaan regresi linear berganda menurut Nugroho (2011), sebagai berikut:

$$SAP = \alpha + \beta_1SDM + \beta_2SPI + \beta_3KSP + \beta_4KMO + e$$

Keterangan:

SAP	= Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi/Slop
SDM	= Kualitas Sumber Daya Manusia
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
KSP	= Ketersediaan Sarana dan Prasarana

KMO = Komitmen Organisasi
e = Nilai standar error

Uji Kesesuaian Model (*Godness of Fit*)

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit* nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila R^2 semakin besar mendekati 1, maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/ uji anova pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hal ini dapat diketahui melalui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji t yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantungnya atau tidak. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat *level of significan* $\alpha = 5\%$ yaitu apabila nilai P value $< 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang mana masa jabatannya dalam satu periode adalah 5 tahun dan dapat kembali dipilih pada periode berikutnya. Kabupaten terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 2 Seketariat yaitu Seketariat Daerah dan Seketariat DPRD. 15 SKPD Dinas, 7 SKPD Badan, 2 SKPD Kantor, 1 SKPD Rumah Sakit, dan 1 SKPD Inspektorat dan 18 SKPD Kecamatan. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) sebagai penerima jabatan yang strategis dan menentukan baik buruknya pengelolaan keuangan daerah. PPK SKPD menjadi filter atas keputusan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus bertanggung jawab atas fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan ditingkat SKPD.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari responden, dimana responden memberikan pernyataan dan penilaian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah (N) sebanyak 102. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 33,9020 dengan standar deviasi 2,15034. Nilai terkecil (*minimum*) kualitas sumber daya manusia sebesar 31,00, sedangkan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 40,00. Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 34,1373 dengan standar deviasi 2,22515. Nilai terkecil (*minimum*) sistem pengendalian internal sebesar 31,00 sedangkan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 40,00. Variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana (KSP) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,7941 dengan standar deviasi

1,63100. Nilai terkecil (minimum) ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 19,00 sedangkan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 25,00. Variabel Komitmen Organisasi (KMO) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,0490 dengan standar deviasi 1,68498 . Nilai terkecil (minimum) komitmen organisasi sebesar 18,00 sedangkan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 25,00.

Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa pernyataan dari semua variabel bebas (*independent variable*) ataupun variabel terikat (*dependent variable*) menunjukkan hasil yang valid karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa semua variabel penelitian telah valid, kecuali pada variabel SAP pada pernyataan ke-8 menunjukkan hasil yang tidak valid karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dilakukan pengujian ulang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak valid pada pengujian pertama. Dapat diketahui bahwa semua variabel bebas (*independent variable*) yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana, dan Komitmen Organisasi, serta variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *asympt. Signifikansi* lebih besar dari 5% atau 0,05 yaitu 0,590 maka data tersebut berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas ini terlihat dari hasil pengolahan data yang menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar. Dan pada uji Heterokedastisitas, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola yang jelas dan juga tersebar diatas ataupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heterokedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Dari hasil pengujian asumsi klasik yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini layak dilakukan analisis regresi berganda karena telah memenuhi uji asumsi klasik. Pada penelitian ini model persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah:

$$SAP = 6,428 + 0,027SDM + 0,376SPI + 0,849KSP + 0,426KMO$$

Keterangan:

SAP	= Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
SDM	= Kualitas Sumber Daya Manusia
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
KSP	= Ketersediaan Sarana dan Prasarana
KMO	= Komitmen Organisasi

Uji Kesesuaian Model (*Godness of Fit*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase kontribusi variabel yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar pada SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927	.859	.853	0.79542

a. *Predictor: (Constant), KMO, SDM, SPI, KSP*

b. *Dependent Variable: SAP*

Sumber: *Output SPSS*

Melihat hasil output olah data nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan erat antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai sebesar 0,927 atau 92,7%. Nilai R Square (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat yaitu variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar. Dari hasil perhitungan data diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0.859 yang berarti sebesar 85,9% Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar dapat dijelaskan oleh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi. Sedangkan sisanya 14,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Uji statistik F berguna untuk menguji model regresi yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	374.208	4	93.552	147.864	.000 ^b
Residual	61.371	97	,633		
Total	435.578				

a. *Dependent Variable: SAP*

b. *Predictors: (Constant), KMO,SDM, SPI, KSP*

Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi uji F adalah sebesar 0.000 (*level of significan*), yang menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar pada SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Uji t yaitu menguji koefisien regresi untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi secara individual menerangkan variasi dependen yaitu Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar.

Tabel 3
Hasil Uji t
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	6.428	1.407		4.567	.000
SDM	.027	.047	.028	.580	.563
SPI	.376	.061	.282	3.843	.002
KSP	.849	.090	.667	9.430	.000
KMO	.426	.083	.346	5.152	.000

a. Dependent Variable: SAP

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar pada SKPD Kabupaten Sidoarjo karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,005.

Variabel independen Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0,002. Serta arah yang ditunjukkan positif. Sehingga hipotesis diterima. Dapat diartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar pada SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Variabel independen Ketersediaan Sarana dan Prasarana (KSP) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000. Dan arah yang ditunjukkan positif. Sehingga hipotesis diterima. Disini dapat dimaksudkan bahwa variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana (KSP) memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar pada SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Variabel independen yang terakhir yaitu Komitmen Organisasi (KMO) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000. Dan arah yang ditunjukkan positif. Sehingga hipotesis diterima. Disini dapat dimaksudkan bahwa variabel Komitmen Organisasi (KMO) memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar pada SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar menunjukkan bahwa nilai signifikansi ρ value sebesar 0,563 > 0,05 dan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,027. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruar pada SKPD kabupaten Sidoarjo. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Sulani (2009) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Azhar (2007) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh sumber daya manusia terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada kinerja pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruar. Pengaruh dari sistem pengendalian internal ini dikatakan kuat dilihat berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi ρ value sebesar 0,002 < 0,05 dan hasil uji regresi

linier berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,376. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada SKPD Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Putri (2013) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Hasil dari uji parsial yang telah dilakukan untuk variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana menghasilkan nilai signifikan ρ value sebesar $0,000 < 0,05$ dan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan nilai koefisien 0,849. Artinya variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada SKPD Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Azhar (2007) yang mengatakan bahwa ada pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan juga di dukung penelitian dari Febiani (2014) pada penelitiannya yang memperoleh hasil hipotesis bahwa ketersediaan sarana dan prasarana mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Riau. Febiani (2014) berpendapat sarana dan prasarana adalah semua yang dapat menunjang atau mendukung segala kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil dari uji t untuk variabel Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI menghasilkan tingkat signifikan ρ value sebesar $0,000 < 0,05$ dan hasil uji regresi linier berganda sebesar 0,426 . Dapat disimpulkan bahwa Komitmen Organisasi memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI. Hal ini didukung oleh penelitian Sulani (2009) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuan Batu karena dengan ditingkatkannya komitmen di lingkungan pemerintahan, maka hal ini akan meningkatkan efisiensi sebab secara otomatis sumber daya manusia dan perangkat pendukung juga akan meningkat dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi lebih optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah sangat efektif hal itu ditunjukkan pada 4 faktor yang mempengaruhi yaitu terdiri dari Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari nilai R Square, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tergolong kuat karena nilai R Square yang variabel bebas yang terdiri dari Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi mendekati nilai 1 yang artinya dapat menjelaskan atau memberikan informasi hampir secara keseluruhan untuk memprediksi variabel dependen yaitu Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada SKPD kabupaten Sidoarjo. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci kesuksesan pembangunan masyarakat.

Pembanguna akan berhasil bila dilakukan oleh tenaga-tenaga yang memiliki *skills* dan *knowledge* serta dilengkapi dengan sikap-sikap yang mendukung akan tetapi masih banyaknya para pegawai menyatakan setuju atas pernyataan bahwa dalam menyusun laporan keuangan masih menggunakan bantuan jasa konsultan sehingga pelatihan dan pengembangan kemampuan bias dikatakan kurang optimal.

Dari hasil uji t yang sudah dilakukan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika sistem pengendalian internal pada pemerintah kabupaten Sidoarjo dilakukan semakin baik, maka semakin efektif penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah kabupaten Sidoarjo.

Hasil dari uji parsial yg telah dilakukan untuk variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana menunjukan hasil pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada SKPD Kabupaten Sidoarjo. Dapat disimpulkan bahwa ketika peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang dilakukan semakin besar, maka semakin besar pula efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dengan perencanaan ketersediaan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat menghadapi risiko kekurangan sumber daya teknologi informatika. Inventarisasi sarana dan prasarana harus dilakukan secara menyeluruh termasuk ketersediaan terhadap perangkat keras dan lunak dalam mendukung penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uji t yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Komitmen Organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual karena dengan ditingkatkannya komitmen di lingkungan pemerintahan, maka hal ini akan meningkatkan efisiensi sebab secara otomatis sumber daya manusia dan perangkat pendukung juga akan meningkat dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada SKPD Kabupaten Sidoarjo akan optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah yang pertama, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memberikan perhatian kepada birokrasi untuk meningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan pelatihan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tersebut dan dibarengi dengan perubahan orientasi dimana lebih banyak ruang bagi para pegawai yang sudah atau memiliki kemampuan yang memadai untuk bertindak sesuai dengan profesinya agar penyusunan laporan keuangan pemerintah lebih efektif dan efisien. Kedua, bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas variabel penelitian, tidak hanya terbatas pada 4 faktor yang ada namun juga dapat menambah variabel independen lainnya yang mungkin memiliki pengaruh juga terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, N.N. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- Ardiansyah. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Pada Unit Kerja KPPN Malang). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Arens, A.A., Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Keduabelas. Erlangga. Jakarta.
- Arfianti, D. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Azhar. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Studi pada Pemerintah Kota Langsa). *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Daft, L.R. 2003. *Management*. Erlangga. Jakarta.
- Dunn, N.W. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Febiani, I. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Satandar Akuntansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Di Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
- Ghozali, I. 2009. *Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, Y.A. 2011. *Olah Data dengan SPSS*. PT. Skripta Media Creative. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standart Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Primayana, K.H., Anantawikrama dan N.A. Surya. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandaan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi* 2(1)
- Putra, Y.D dan Ariyanto, D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13(1): 14-32.
- Putri, G.Y. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Rahmansah. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Jakarta.
- Sulani, A. 2009. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Widyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010. Pengaruh SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). *Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto*. 13-14 Oktober.